

**ANALISIS PELAKSANAAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNANDI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH  
KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN**

**TESIS**

**OLEH**

**AISYAH OKTAVIANI PUTRI**

**151801022**



**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**ANALISIS PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN MEDAN  
PETISAH KOTA MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**AISYAH OKTAVIANI PUTRI  
NPM. 151801022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**2017**

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di  
Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah  
Kota Medan


**N a m a** : Aisyah Oktaviani Putri

**N P M** : 151801022

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE**

  
**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



  
**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



  
**Prof. Dr. Irs Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2017**

**Nama : Aisyah Oktaviani Putri**

**NPM : 151801022**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua sidang : Dr. Warjio, MA**  
**Sekretaris : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, S.E**  
**Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si**  
**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

Yang menyatakan,



**Aisyah Oktaviani Putri**

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN

Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah wadah atau forum masyarakat untuk menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai sebagian. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan.

Yang menjadi kekurangan dalam hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah (1) faktor anggaran. (2) sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah. (3) sumber daya organisasi atau perangkat daerah yang belum memadai. (4) pergeseran usulan kegiatan. Serta faktor lainnya seperti mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi perlu upaya serius untuk membenahinya sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran hingga realisasi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap infrastruktur, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik. (2) faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

**Kata Kunci:** Analisis, Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan.

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT PLANNING IN KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH MEDAN CITY**

*Implementation of the development begins with the planning which is called the Development Planning Council (Musrenbang). Musrenbang is a forum or community forum to accommodate aspirations in accordance with the needs of the community. From the observation of activities realized in 2015, the absorption of the proposed activities derived from Musrenbang only reached partly. The process of regional development planning that takes place in general still has some shortcomings.*

*The shortcomings in the results of the implementation of development planning are (1) budget factor. (2) community resources are generally weak. (3) inadequate organizational or regional device resources. (4) shifting activity proposal. As well as other factors such as the mechanism of submission of proposed activities that have not been standardized and the role of actors public policy makers are significant.*

*To optimize the success of planning to the implementation stage it is necessary to seriously improve it since the proposal submission process, preparation of planning documents and budget until realization.*

*The purpose of this study is to know and describe (1) how the implementation of development planning in Sei Putih Tengah Urban to infrastructure, in the form of road construction and improvement in physical field. (2) the factors that become obstacles not the implementation of the development plan.*

*This study used descriptive qualitative method. The sample in this study amounted to 11 people. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation. After the data obtained then in the analysis by using data reduction, data presentation and verification.*

**Keywords:** *Analysis, Implementation, Development Planning.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas misteri hidup yang indah, limpahan Rahmat dan segala kemudahan-Nya sehinggasyadapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan Ketua Penguji yang telah membantu dalam tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, S.E, selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati saya menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, Rachmat dan Mariaty Samosir yang sangat saya sayangi, untuk segala investasi hidup yang telah diberikan, terima kasih atas kesediaannya

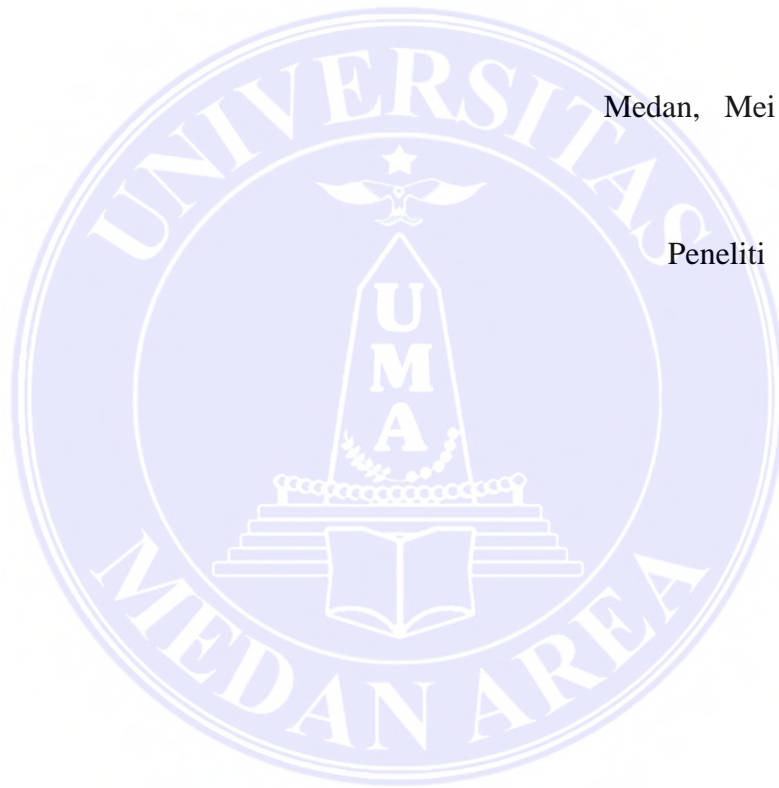


menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan. Dan kepada kedua saudara saya abang dan kakak, Setiady Sampurna Putra dan Pramytha Anggia Putri, terima kasih atas do'a, dukungan baik moril dan materil serta kasih sayang yang telah diberikan.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. WassalamualaikumWr.Wb.

Medan, Mei 2017

Peneliti



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perencanaan Pembangunan .....	12
2.2 Pengertian Perencanaan .....	13
2.2.1. Syarat-syarat Perencanaan .....	15
2.2.2. Tujuan Perencanaan .....	16
2.2.3. Prinsip-prinsip Perencanaan .....	17
2.3 Pembangunan .....	20
2.4 Teori Perencanaan Pembangunan .....	22
2.4.1. Teori Kebijakan Publik .....	25
2.4.2. Kebijakan Publik dalam Perencanaan Pembangunan .....	28
2.5 Keterlibatan Pemerintah atau Negara dalam Perencanaan .....	32
2.6 Peraturan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah .....	34
2.6.1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 .....	35
2.6.2. Prinsip Perencanaan (PP No. 8 Tahun 2008) .....	37

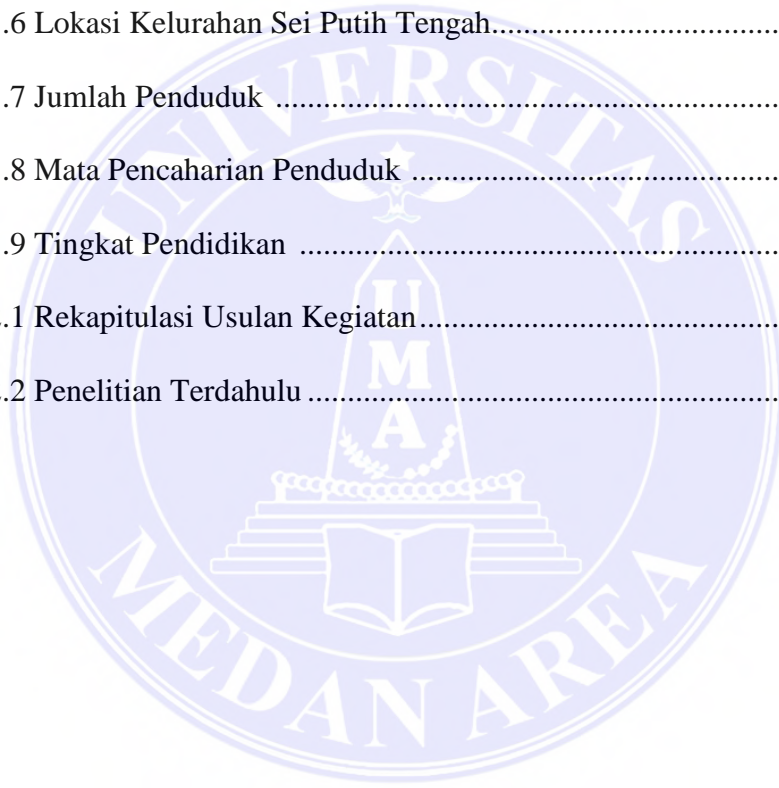
2.6.3. Pendekatan dalam Perencanaan .....	38
2.6.4. Aspek koordinasi Perencanaan Pembangunan .....	39
2.6.5. Tahapan Perencanaan Pembangunan .....	39
2.6.6. Tolak ukur keberhasilan Pembangunan .....	41
2.7 Kerangka Pemikiran .....	43
2.8 Daftar hasil jurnal penelitian Nasional.....	44
2.9 Daftar hasil jurnal penelitian Internasional .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	48
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	48
3.2.2. Waktu Penelitian.....	49
3.3 Populasi Dan Sampel .....	49
3.3.1. Populasi.....	49
3.3.2. Sampel.....	49
3.4 Informan Penelitian.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data .....	53
3.6.1. Reduksi Data.....	54
3.6.2. Penyajian Data .....	54
3.6.3. Verifikasi .....	54
3.7 Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi .....	55
4.1.1. Kondisi Geografis .....	55
4.1.1.1 Letak Kelurahan .....	55
4.1.1.2 Batas Kelurahan .....	56
4.1.1.3 Luas Kelurahan .....	56
4.1.1.4 Kelompok Jabatan Fungsional .....	57
4.1.2 Tupoksi Kelurahan.....	59
4.1.2.1 Tupoksi Lurah .....	59
4.1.2.2 Tupoksi Sekretaris Kelurahan .....	60

4.1.3. Kondisi Demografis .....	61
4.1.3.1 Penduduk Kelurahan .....	61
4.1.3.2 Mata Pencaharian .....	62
4.1.3.3 Tingkat Pendidikan .....	63
4.1.3.4 Agama .....	64
4.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi .....	64
4.1.4.1 Perumahan dan Tempat Ibadah .....	64
4.1.4.2 Kesehatan Masyarakat .....	65
4.1.4.3 Keadaan Rumah Tangga .....	66
4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	66
4.3 Hasil Pelaksanaan Musrenbang.....	71
4.4 Payung Hukum Hasil Pelaksanaan Musrenbang .....	77
4.5 Faktor-faktor Pelaksanaan Yang Tidak Terlaksana .....	79
4.6 Penelitian Terdahulu .....	87
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usulan program Kelurahan tahun 2015 .....	6
Tabel 1.2 Usulan yang belum terealisasi.....	8
Tabel 1.3 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya .....	44
Tabel 1.4 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Internasional Sebelumnya .....	46
Tabel 1.5 Jumlah sampel di Kelurahan Sei Putih Tengah .....	50
Tabel 1.6 Lokasi Kelurahan Sei Putih Tengah.....	55
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk .....	62
Tabel 1.8 Mata Pencaharian Penduduk .....	62
Tabel 1.9 Tingkat Pendidikan .....	63
Tabel 2.1 Rekapitulasi Usulan Kegiatan.....	73
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual .....	43
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sei Putih Tengah .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaandan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat satu tubuh yang diantara satu organ dengan organ lainnya memiliki keterhubungan yang melekat, karena pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus mewujud dalam pembangunan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Dalam struktur pemerintahan pusat dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dalam struktur pemerintahan daerah pada umumnya disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). *Mindset* dalam proses penyusunan RKPD nampaknya masih sebatas pada retorik dan belum sepenuhnya tercermin dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD. Bahkan yang menjadi catatan penting adalah pola pikir dan cara pandang lama masih cukup kental mewarnai proses RKPD, misalnya cenderung linier dan belum mampu melihat masalah secara holistik. (Kuncoro, 2012:3)

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang ideal, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan tahapan-tahapan, sebagaimana juga sudah terdefiniskan di dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa tahapan tersebut meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah, sebagaimana

dinyatakan Kuncoro (2012:43), bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga menjadi penting dalam proses penyusunannya dan harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dalam melaksanakan pembangunan tentu melalui beberapa proses perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), hal tersebut adalah merupakan tata urutan hierarki yang bersifat bottom up-top down. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pada umumnya perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengenal empat pendekatan, sebagaimana juga disebutkan di dalam PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010 Pasal 6, diantaranya adalah teknokratis, partisipatif, politis dan top down-bottom up.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bangsa ini harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang jelas, baik untuk tingkat Desa/Kelurahan,



Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Untuk mewujudkan sistem tersebut Pemerintah telah membentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui Musrenbang inilah dicari apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat.

Walau akhirnya lebih banyak keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat direalisasikan ke dalam program-program nyata di lapangan, namun sebagai alat adanya mekanisme penjarangan aspirasi rakyat, musrenbang dinilai sebagai mediasi yang masih pantas untuk terus dijalankan. Munculnya isu *GoodGovernance* dalam pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah ataupun disisi warga.

Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, tanggap, serta mampu menyusun kebijakan yang dapat menjamin hak-hak asasi dan keadilan sosial masing-masing warganya. Sejalan dengan harapan terhadap peran negara tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, dan tidak apatis. Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Kondisi perekonomian yang membaik tidak dapat dilepaskan dari peran penting infrastruktur. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta

subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan kepada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pembangunan daerah. Menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai proses dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu kiranya disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarannya. Dalam rangka perwujudan perencanaan dan penganggaran yang baik ini maka semua dokumen perencanaan dan penganggaran pada dinas pengelola infrastruktur ini harus dijaga konsistensinya.

Hal ini dapat dijumpai pada sejumlah pemerintah daerah yang melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah. Meskipun secara normatif sistem perencanaan nasional telah berpedoman pada satu regulasi, tapi proses perencanaan pembangunan tetap berlangsung berbeda antar daerah, tergantung kapasitas dan kondisi kedaerahan pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga dipastikan hasilnya pun akan berbeda satu sama lain. Sungguhpun demikian ada suatu kecenderungan yang sama dalam perencanaan pembangunan daerah, yakni tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Padahal ruang-ruang publik telah dibuka dengan turut terdesentralisasinya perencanaan pembangunan. (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000)

Pembangunan merupakan proses yang tanpa henti, begitu pula dengan pembangunan masyarakat, maka sangat diperlukan kejelian dan kepekaan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang muncul dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan. Ada sejumlah faktor yang membantu tercapainya keberhasilan pembangunan, yaitu:

1. Adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi sosial dan nasional.
2. Adanya kesungguhan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten mengelola upaya pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan rencana.

Seringkali dalam proses perencanaan pembangunan, tidak menghasilkan sebuah perencanaan yang baik, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan terdapat fasos dan fasum. Dimana fasos ini adalah fasilitas sosial dan fasum itu sendiri adalah fasilitas umum. Arti atau pengertian fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, saluran air, jembatan, *fly over*, alat penerangan umum, listrik, banjir kanal, trotoar, tempat pembuangan sampah. Sedangkan arti atau pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan memperbaiki fasum atau fasos itu sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang di buat oleh

pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum.

Berdasarkan hal diatas penelilitertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah pada tahun 2015-2016. Permasalahan yang terlihat di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah adalah bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang berada di Kelurahan tersebut masih banyaknya kekurangan seperti perbaikan jalan yang rusak, pengaspalan jalan, pengorekan parit, pemasangan lampu, dan drainase. Sementara dari pihak Kelurahan sudah mengusulkan. Namun, belum tentu masuk ke dalam skala prioritas. Lebih jelasnya di bawah ini adalah Tabel 1.1 beberapa usulan program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah pada tahun 2015 di bidang Infrastruktur.

Tabel 1.1

Usulan program dan kegiatan pembangunan kelurahan tahun 2015

<b>No.</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	- Rehab kantor - Lurah/Aula Kantor Gibsun dan Pintu Gerbang	Jln. Periuk Lingk VI
2	- Pengaspalan Hormit - Pengaspalan Jln Rantang/Ceret	Jln. Panci Lingk I Jln. Rantang/Jln. Ceret Lingk II

3	- Pengaspalan Hormit - Pengaspalan Hormit	Jln. Piring Lingk I Jln. Gelas Lingk V
4	- Pembetonan Parit - Pembuatan Parit	Jln. Panci Lingk I Kanan dan Kiri Jln. Kualibelakang Lingk VII
5	- Pengorekan Parit Gatot Subroto Kiri	Jln. Gatot Subroto Lingk I
6	- Pengaspalan Hormit Jln. Belanga	Jln. Belanga Lingk V
7	- Pengorekan Parit kanan	Jln. Ayahanda Lingk I s.d VII
8	- Pengorekan Parit Kanan dan Kiri - Pengorekan Parit Jln. Rantang - Pengorekan Parit	Jln. Ceret Lingk II dan III Jln. Rantang Lingk II Jln. Gelas Kanan dan Kiri Lingk V
9	- Pengorekan Parit	Jln. Sendok Lingk III
10	- Pembetonan Jln. Panci - Pembetonan Jln. Piring - Pembetonan Pinggiran Sei Putih	Jln. Panci Lingk I Jln. Piring Lingk I Jln. Masjid s.d Simp. Barat
11	- Perbaikan lampu jalan yang mati - Perbaikan lampu - Pembuatan lampu - Pembuatan lampu	Sepanjang Jln. Periuk Lingk VI Jln. Gelas Jln. Pabrik Tenun Lingk V Jln. Kualibelakang Damem, Gang Waspada, Gang Sardot Lingk VII Jln. Kualibelakang Lingk VII
12	- Perbaikan lampu	Sepanjang Jln. Rantang Lingk II
13	- Perbaikan lampu	Jln. Sendok Lingk III
14	- Perbaikan lampu Jln dan Penambahan	Sepanjang Jln. Masjid pinggiran Sei Putih dari Lingk I dan Lingk VII s.d Simpang Gatsu s.d Jln Kualibelakang
15	- Pembuatan Gorong-Gorong Lingk VII	Jln. Kualibelakang Dame, Persatuan, Teratai
16	- Pemasangan lampu	Jln. Gelas Gg. Mangkok I dan II dan Jln. Gelas Gg. Perabot Lingk V
17	- Pemasangan lampu	Jln. Cangkir Lingk IV
18	- Pembuatan perpustakaan	Jln. Periuk

Sumber: Data Kelurahan Sei Putih Tengah 2015

Sementara Tabel 1.2 di bawah ini adalah usulan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah pada tahun 2015 yang diusulkan kembali di Tahun 2016.

Tabel 1.2

Usulanyang belum terealisasi dandiusulkan kembali tahun 2016

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI
1	2	3
1	- Perbaikan lampu jalan yang mati - Perbaikan lampu - Pembuatan lampu - Pembuatan lampu	Sepanjang Jln. Periuk Lingk VI Jln. Gelas Jln. Pabrik Tenun Lingk V Jln. KualI Gang Damem, Gang Waspada, Gang Sardot Lingk VII Jln. KualI belakang
2	- Perbaikan lampu	Sepanjang Jln. Rantang Lingk II
3	- Perbaikan lampu	Jln. Sendok Lingk III
4	- Perbaikan lampu Jln dan Penambahan	Sepanjang Jln. Mesjid pinggiran Sei Putih dari Lingk I dan Lingk VII s.d Simpang Gatsu s.d Jln KualI
5	- Pengaspalan Hormit - Pengaspalan Jln Rantang/Ceret	Jln. Panci Lingk I Jln. Rantang/Jln. Ceret Lingk II
6	- Pengaspalan Hormit - Pengaspalan Hormit	Jln. Piring Lingk I Jln. Gelas Lingk V
7	- Pengaspalan Hormit Jln. Belanga	Jln. Belanga Lingk V
8	- Pemasangan lampu	Jln. Gelas Gg. Mangkok I dan II dan Jln. Gelas Gg. Perabot Lingk V
9	- Pemasangan lampu	Jln. Cangkir Lingk IV

Sumber: Data Kelurahan Sei Putih Tengah 2016

Tabel 1.1 adalah program yang di usulkan oleh pihak Kelurahan Sei Putih Tengah di bidang infrastruktur pada tahun 2015. Dalam program tersebut terdapat pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, perbaikan jalan, pemasangan lampu, perbaikan lampu, pembuatan lampu, yang di inginkan masyarakat yang masuk ke dalam usulan pada pelaksanaan Musrenbang. Namun, hanya beberapa saja yang dapat terealisasi. Program usulan kegiatan yang sebagian terealisasi dapat di lihat di Lampiran 1.1. Dengan adanya hal tersebut

maka di usulkan kembali di tahun 2016 yang tertera di Tabel 1.2. Sebagian usulan ternyata belum masuk ke daftar skala prioritas. Bahkan belum terealisasi dan harus menunggu untuk dapat di usulkan kembali oleh pihak kelurahan.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dan mengangkat hal tersebut menjadi permasalahan. Karena jika pembangunan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi atau benar-benar terlaksana maka dapat mempengaruhi terlaksananya Musrenbang yang di harapkan. Dengan kata lain jika perencanaan dari pihak Kelurahan dapat menjadi skala prioritas hal itu akan menjadi awal dari proses pelaksanaan pembangunan yang optimal, karena pembangunan harus dipandang sebagai suatu aktifitas yang menyeluruh, yang pada hakikatnya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang layak, berkeadilan dan bersejahtera.

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat menjadi kendala atau menghambat kemajuan dari pada kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Putih Tengah tersebut. Padahal kita semua dapat melihat bahwa pemerintah harus mampu dalam mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh yang membutuhkan kerjasama masyarakat baik berupa pendapat, dukungan, ataupun keikutsertaan secara aktif. Hal ini menjadi titik pertama yang mendorong untuk dilakukannya penelusuran dalam menganalisis sejauh mana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur Kelurahan Sei Putih Tengah, seperti perbaikandan pengaspalan jalan rusak dan perbaikan di bidang infrastruktur lainnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanapelaksanaan perencanaan pembangunandi Kelurahan Sei Putih tengah Kecamatan Medan Petisah, dalam pembangunan infrastruktur?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak terealisasi yang di sesuaikan masyarakat di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaanperencanaan pembangunan tersebut di bidang infrastruktur terhadap masyarakat.
2. Untuk menganalisisfaktor-faktor mengapa hasil dari pada pelaksanaan pembangunan tersebut tidak terealisasikan.



## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dari hal kecil yang ada di masyarakat. Khususnya dalam memberikan informasi tentang pentingnya pembangunan demi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan.
3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perencanaan Pembangunan

Kata perencanaan pembangunan mungkin tidak asing lagi ditelinga kita, apalagi di era globalisasi ini, perencanaan sangatlah penting sebelum melaksanakan hajat bagi orang banyak tapi kita lupa bahwa kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri tidak terlepas dari kesalahan dalam merencanakan atau perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak.

Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat realitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung. Banyak perencanaan pemerintah yang gagal gara-gara apa yang direncanakan tersebut tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Bahkan kadang-kadang alih-alih program yang dilaksanakan dapat memberdayakan masyarakat, akan tetapi pada akhirnya ternyata malah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Artinya pemerintah selalu memberikan ikan, bukan kail seperti yang sering disampaikan oleh beberapa pakar (Abe 2001).

Melihat kenyataan ini, timbul tanda tanya besar bagi perencana, kenapa hal ini terjadi. Perencanaan sebagai fungsi manajemen yang pertama, karena tanpa

perencanaan para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana mereka harus mengorganisasi orang dan sumber daya bahkan tidak mempunyai gagasan yang jelas tentang apa yang mereka butuhkan untuk pengorganisasian.

## 2.2 Pengertian Perencanaan

GR. Terry (2003) mengemukakan bahwa perencanaan dikerjakan terus menerus dan merupakan suatu kegiatan yang yang tidak pernah selesai. Seluruh rencana bersifat sementara dan dapat dirubah atau diganti apabila ada fakta-fakta baru dan variabel-variabelnya perlu dievaluasi kembali. Rencana-rencana umumnya ditinjau kembali secara teratur dan apabila perlu segera dirubah untuk menghadapi situasi yang baru.

Perencanaan menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009) dalam buku Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah, adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Menurut Terry (1960) dalam Mardikanto (2010), perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di

masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu:

1. Politik
2. Teknokratik
3. Partisipatif
4. Atas-bawah (top-down)
5. Bawah-atas (bottom-up)

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, “perencanaan teknokrat dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu”.

Menurut penjelasan Undang-Undang 25 No.Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, “perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki”. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004, dijelaskan pula partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Selain itu, menurut penjelasan Undang-Undang No.25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, dan Desa.

### **2.2.1 Syarat-syarat Perencanaan**

Syarat-syarat Perencanaan yang baik menurut Sondang Siagian, yaitu:

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
- b. Perencanaan sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai
- c. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat
- d. Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan
- e. Kesederhanaan
- f. Fleksibilitas
- g. Rencana memberikan tempat pada pengambilan resiko
- h. Rencana yang programatik
- i. Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan

Dan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Atau perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan menurut defenisi di atas ada 4 dasar perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat pencapaian tujuan
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan

Serta menurut Friedman mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi (Hadi, 2001:19). Menurut Sondang P. Siagian ciri-ciri rencana yang baik (Nasution,2008:22-23) adalah:

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.

### **2.2.2 Tujuan Perencanaan**

Tujuan perencanaan dari masing-masing proses perencanaan sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan teknokrat**

Tujuannya untuk membangun perencanaan strategis menetapkan ketentuan-ketentuan, standar, prosedur petunjuk pelaksanaan serta evaluasi, pelaporan dan langkah taktis untuk menopang organisasi (Tomatala, 2010).

#### **2. Perencanaan partisipatif**

Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan.

### 3. Perencanaan top down

Tujuannya adalah untuk menyeragamkan corak, karena perencanaan top down menurut Djunaedi (2000) dalam kegiatan perencanaan kota dan daerah dilakukan dengan mengacu pada corak yang seragam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan mengikuti “juklak dan juknis” (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis).

### 4. Perencanaan bottom up

Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan dari bawah, karena menurut Sumarsono (2010), apabila di Indonesia perencanaan bottom up dimulai dari tingkat Desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk peraturan perundangan ataupun kebijakan lain, misalnya melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

#### **2.2.3 Prinsip-prinsip Perencanaan**

Secara umum prinsip perencanaan menurut Abe dalam Ovalhanif (2009) adalah:

- a. Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi
- b. Bagaimanamencapai hal tersebut
- c. Siapa yang melakukan
- d. Lokasi aktivitas
- e. Kapan akan dilakukan, berapa lama
- f. Sumber daya yang dibutuhkan

Prinsip-prinsip perencanaan menurut Prinsip-prinsip Penyusunan Renstra

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD (2007) sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip perencanaan teknokratis adalah:

- a. Adarumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
- b. Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi, kepentingan, dan dampak isuterhadapkesejahteraan masyarakat
- c. Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria *SMART*(*specific, measurable, achievable, result oriented, time bound*)
- d. Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
- e. Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
- f. Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana
- g. Ada prioritas program
- h. Ada tolak ukur dan target kinerja capaian program

2. Prinsip-prinsip perencanaan partisipatif adalah:

- a. Ada identifikasi *stakeholders* yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi, misi, dan agenda SKPD serta dalam proses pengambilan keputusan penyusunan renstra SKPD
- b. Ada kesetaraan antara *government* dan *non government stakeholders* dalam pengambilan keputusan
- c. Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- d. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
- e. Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap renstra SKPD
- f. Ada pelibatan media



- g. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan, dan prioritas program

3. Prinsip-prinsip perencanaan *top down* adalah:

- a. Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan Renstra Kementerian atau Lembaga
- b. Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD
- c. Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- d. Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global *Millenium Development Goals: Sustainable Development*, pemenuhan HAM, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan sebagainya

4. Prinsip-prinsip perencanaan *bottom up* adalah:

- a. Ada penjangkaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih
- b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- c. Mempertimbangkan hasil Forum Multi *Stakeholders* SKPD
- d. Memperhatikan hasil Proses Penyusunan Renstra SKPD

Sedangkan menurut Sumarsono (2010) prinsip perencanaan teknokrat dan partisipatif, dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Prinsip perencanaan teknokrat yaitu dilakukan secara sepihak oleh para teknokrat yang duduk di struktur pemerintah, tidak melibatkan warga masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan biasanya justru tidak sesuai dengan apa yang

terjadi di lapangan, karena seringkali jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dibiarkan menjadi penonton saja.

2. Prinsip perencanaan partisipatif yaitu masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam arti memberikan peluang masyarakat untuk menggunakan hak-hak politiknya untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

### **2.3Pembangunan**

Definisi pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari perencanaan, sebelum melakukan pembangunan harus dilakukan perencanaan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan memiliki 4 tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

2. Penetapan rencana

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah

selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

### 3. Pengendalian pelaksanaan rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan.

### 4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan pembangunan yang utuh. Dalam suatu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran apabila seluruh unsur yang berhubungan dengan pembangunan diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi dari seluruh unsur dalam perencanaan pembangunan terutama di daerah sangatlah penting dan sangat mungkin dilakukan (Tjokroamidjojo 1995:Ovalhanif 2009).

## 2.4 Teori Perencanaan Pembangunan

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004:6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Menurut Sjafrizal (2014:24), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat *implementif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset atau penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan atau kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual atau dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas meja, tanpa melihat realita di lapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah 2004:7).

Maka, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi di pihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses

perencanaan. Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya.

Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004:8) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi. Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama. Janssen (1995) dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah (2004:8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004:9) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis perencanaan bersifat makro atau luas.
2. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.

3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara *interdisipliner*, *general* dan *universal*, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (*agent of development*) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.

#### **2.4.1 Teori Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan



Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai

tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

#### **2.4.2 Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan**

Menurut William Dunn (2000:1), memberikan definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, Dunn (2000:131) menambahkan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam membuat analisis kebijakan publik, seorang analisis akan melalui tahap-tahap kerangka pemikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2000), yaitu:

1. Merumuskan masalah-masalah kebijakan. Yaitu kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Meramal masa depan kebijakan. Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. Rekomendasi aksi-aksi kebijakan. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Didalamnya terkandung informasi mengenai aksi-aksi

kebijakan, konsekuensi di masa depan setelah melakukan alternatif tindakan, dan selanjutnya ditentukan alternatif mana yang akan dipilih.

Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/APBD berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas (Budimanta:2005).

Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana

pembangunan Desa, musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten/Kota dan musrenbang Provinsi guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang.

Jika ditinjau dari proses kebijakan publik ada 4 kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, antara lain adalah:

1. Perumusan masalah
2. Perumusan agenda (agenda setting)
3. Perumusan usulan
4. Pengesahan usulan

Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang Desa dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dan memberikan masukan tentang permasalahan yang sedang dihadapi mereka untuk dibawa ke tingkat musrenbang Kelurahan lalu musrenbang Kecamatan dan selanjutnya akan ke Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun musrenbang Negara yang selanjutnya diproses untuk menjadi agenda pemerintah. Proses ini dilanjutkan dengan penyaringan usulan-usulan yang disesuaikan dengan kepentingan politik dan pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya setelah tahapan legisasi kepada pemerintah atau DPR/DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan atau Undang-Undang (Sugandhy, Aca & Rustam Hakim:2007).

Dan tentu saja kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus mengerti tentang Undang-Undang yang menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat juga diharapkan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yaitu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dan masyarakat juga tentunya harus paham apa fungsi partai-partai politik yang dipercayakan masyarakat untuk duduk di DPR atau DPRD, bahwa setiap parpol harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat paling tidak bisa memberikan contoh pada masyarakat tentang pendidikan politik yang baik, juga bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi agar bisa segera menjadi agenda pemerintah.

Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat melalui 3 jalur:

1. Jalur Musrenbang, dimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya.
2. Jalur Politik atau Partai Politik, dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.
3. Jalur Birokrasi, bisa dilakukan melalui SKPD atau langsung pada kepala daerah.

Namun aspirasi masyarakat kita masih dianggap lemah atau monoton pada kontribusinya dalam perencanaan pembangunan, hal ini di sebabkan karena belum pahamnya masyarakat pada kebutuhan mereka sendiri, seharusnya disinilah peran anggota dewan yang terhormat itu di fungsikan, mereka harus bisa terus mendampingi masyarakat dalam memilih kebijakan pembangunan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kita bersama. Adapun masyarakat yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya untuk dimasukan menjadi kebijakan publik pada perencanaan pembangunan tapi terkendala akan

konsep-konsep, aturan, atau prosedur yang ada pada pemerintahan (Wahab, Solichin Abdul:2001).

Disini lah perlunya pemahaman tentang kebijakan publik berhubungan dengan administrasi pembangunan, masyarakat harus memahami aturan-aturan main dalam pelaksanaan kebijakan publik pada sektor pembangunan. Yang mana pelaksanaan tersebut haruslah berpayung hukum, sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut telah dinyatakan Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah(Winarno, Budi:2007).

## **2.5 Keterlibatan Pemerintah atau Negara Dalam Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada falsafah hidup kemasyarakatan dan falsafah politik masyarakat (negara) tersebut. Pada masyarakat liberalis pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak ikut campur tangan kegiatan-kegiatan masyarakat, pemerintah atau negara hanya menjaga ketertiban dan keamanan warganya. Namun pada negara-negara sosialis, falsafah masyarakatnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam masyarakat bangsa tersebut.

Peranan dan fungsi pemerintahan juga seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomis material dan terpengaruh dari banyak sedikitnya sumber-sumber kekayaan alamnya. Pada negara yang baru berkembang diperlukan peranan pemerintah yang lebih besar sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan.

Menurut Irving Swerdlow yang dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam buku Pengantar Administrasi Pembangunan (2005) bahwa cara pelaksanaan peranan pemerintah sebagai *involvement* atau campur tangan dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (*operations*): Pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan sendiri.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): Penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain) penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang *action laden* (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain).
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): Cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.
4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*). Disini dilakukan cara persuasi dan nasihat. Misalnya para petani supaya masuk KUD.

5. Pengaruh tidak langsung (*indirect influence*). Merupakan bentuk *involvement* yang paling ringan, misalnya memberikan informasi atau menjelaskan kebijaksanaan pemerintah.

Pada kasus Negara Indonesia, seperti telah dikemukakan pada pembahasan awal, bahwa secara filosofis kewajiban negara untuk negara atau pemerintah untuk memajukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, ketentraman seluruh rakyat secara merata atau seimbang. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

Untuk itu pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan ke arah tersebut yang dinamakan proses pembangunan. Proses pembangunan tersebut didahului dengan perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan.

## **2.6 Peraturan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat



memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah seyogyanya mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000: Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

#### **2.6.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pembangunan Peraturan Pemerintah**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai hubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
13. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

#### **2.6.2 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008)**

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

### **2.6.3 Pendekatan Dalam Perencanaan**

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan. Beberapa pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas.

1. Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan presiden atau gubernur atau bupati secara langsung adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih mereka berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan partisipatif, berarti melibatkan semua *stakeholders* pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan bawah-atas dan atas-bawah, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, rencana pembangunan di selaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Desa,

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Permendagri No. 54 Tahun 2010).

#### **2.6.4 Aspek Koordinasi Perencanaan Pembangunan**

1. Aspek fungsional. Adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara berbagai kegiatan, antara satu instansi dengan instansi lain, antara setiap tahap perencanaan, dan antara program atau kegiatan pada suatu wilayah dengan wilayah lain.
2. Aspek formal. Adanya kaitan antara program atau kegiatan yang direncanakan dengan peraturan, instruksi, edaran dan petunjuk dari tingkat nasional.
3. Aspek struktural. Adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap instansi yang bersangkutan.
4. Aspek material. Adanya kaitan dan koordinasi antara program atau kegiatan intra dan antar instansi.
5. Aspek operasional. Adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi maupun kebutuhan material.

#### **2.6.5 Tahapan Perencanaan Pembangunan**

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 tahapan perencanaan pembangunan:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya.

Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat di ambil tindakan sedini mungkin.

Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain, melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Analisis dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui

dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang meliputi:

- a. Indikator masukan
- b. Indikator keluaran
- c. Indikator hasil atau manfaat

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).

#### **2.6.6 Tolak Ukur Keberhasilan Infrastruktur Pembangunan**

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang penting guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah beribadah dan jaringan

layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung peningkatan akses masyarakat, yaitu: jalan dan jembatan.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi pedesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi, jalan dan jembatan.

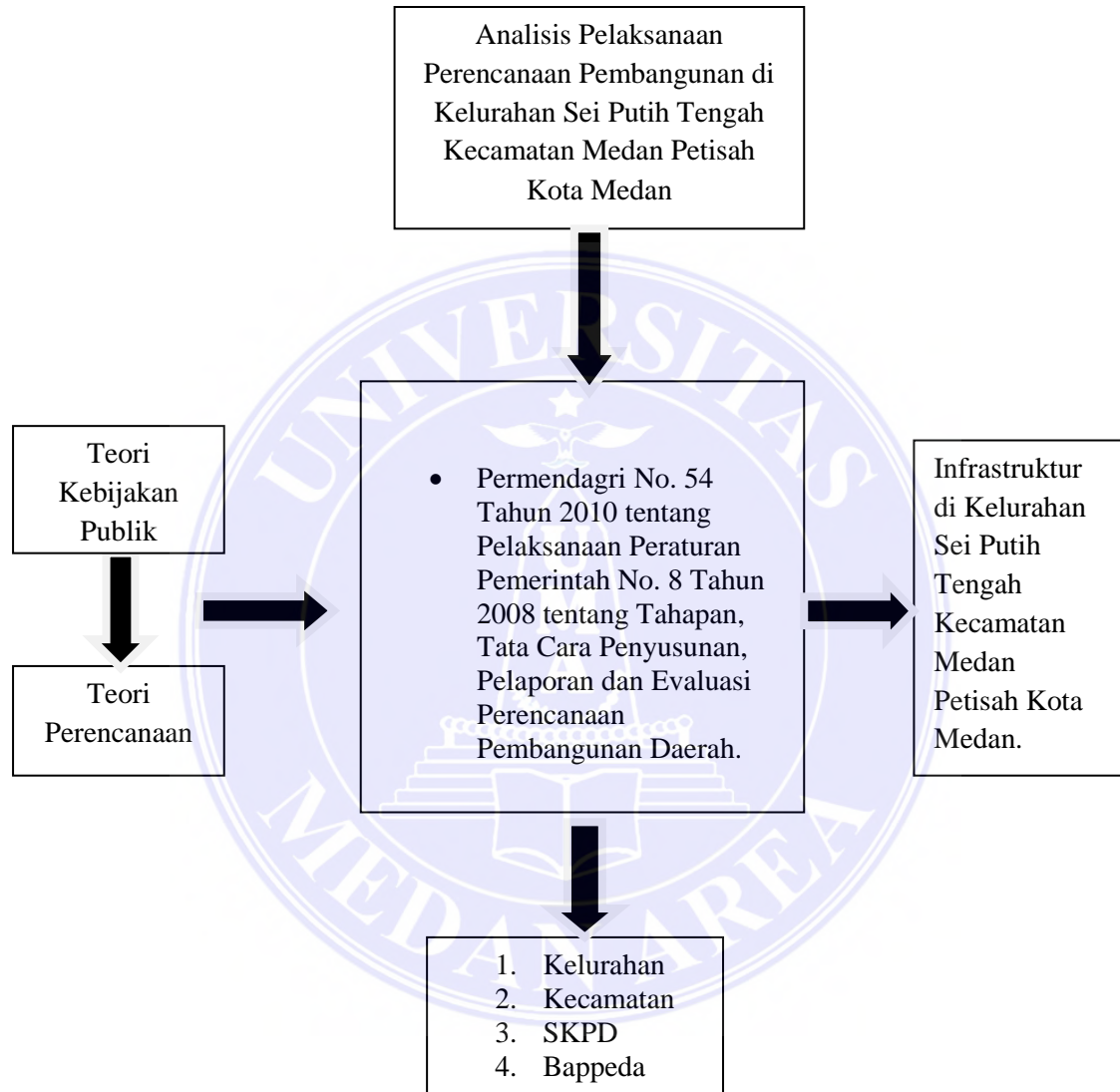
Dalam bidang infrastruktur, meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.



## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.1  
Skema Kerangka Konseptual



Tabel 1.3

## 2.8 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya

No	Judul	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ricky Wirawan. Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang 2015).	Melibatkan masyarakat ( <i>stakeholders</i> ) dalam menelaraskan rencana pembangunan di Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Fenomena dari permasalahan adalah pemerintah desa masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang selanjutnya.	Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari informan, dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data & penarikan kesimpulan.	Berdasarkan daftar hadir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan, keaktifan masyarakat dalam penelitian ini hadir & aktif. Pada tingkat ini masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam forum Musrenbang meskipun pengambilan keputusan dalam beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Meski demikian masyarakat Kecamatan Dusun Selatan aktif dalam memberikan aspirasi yang berupa ide, informasi, saran, kritik serta penilaian pada usulan program kegiatan yang akan menjadi pembahasan pada kegiatan Musrenbang.	Melihat proses Musrenbang di Kecamatan Dusun Selatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang di harapkan oleh masyarakat, serta partisipasi masyarakat baik, hadir & aktif. Maka kedepannya disarankan agar tetap mempertahankan dan meningkatkan keaktifan serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Aparat Kecamatan perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perangkat desa kegiatan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan sektor fisik yaitu, pembangunan infrastruktur saja tetapi juga dalam pembangunan sektor non fisik seperti sektor pendidikan, sanitasi, kesehatan, pertanian/perkebunan juga penting peranannya untuk mendukung pembangunan daerah.
2	Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. (Studi kasus di	Adanya ketimpangan antara jalan di ruas perkotaan & pedesaan. Kondisi pembangunan jalan di antara ruas jalan perkotaan	Jenis metode yang di gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang di gunakan adalah analisis data model <i>spradley</i> .	Selama berjalannya pembangunan jalan banyak sumbangsih yang diberikan masyarakat guna memperlancar kegiatan pembangunan jalan	Bantuan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat

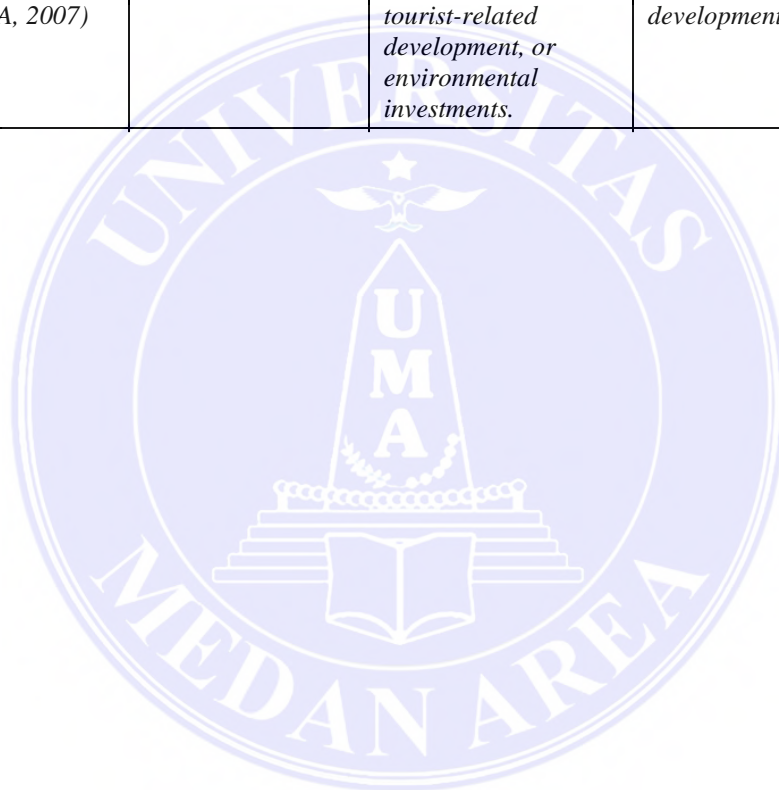
	<p>Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). (Jurnal Administrasi Publik. Muhammad Faisal Asariansyah. Universitas Brawijaya, Malang. 2015).</p>	<p>&amp;pedesaan baik itu di Kecamatan Lawang khusus maupun Kabupaten Malang secara umum masih jauh dari harapan tingkat baik dalam pembangunan. Kondisi tersebut juga sangat di sayangkan karena hampir seluruh pembangunan jalan tersebut sangat sedikit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.</p>		<p>tanpa dapat dihitung secara materi. Dapat disimpulkan dalam hal ini tingkat partisipasi yang ditunjukkan masyarakat Desa Bedali, Sumberporong dan Mulyoarjo sangat besar dalam hal pembangunan jalan.</p>	<p>pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan.</p>
3	<p>Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik Di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara. (Jurnal Administrasi Negara, Meri Yosin. Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur 2013).</p>	<p>Masih memerlukan proses agar penyusunan perencanaan pembangunan fisik dapat meningkatkan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kecamatan Sangatta Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari observasi sementara di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Sangatta terdapat indikasi yang mengarah pada rendah tingkat evaluasi pelaksanaan. Seperti adanya bangunan-bangunan yang tidak beraturan dan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini narasumber dilakukan melalui <i>teknik purposive sampling</i>. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumen.</p>	<p>Penyusunan perencanaan sistematis dan berurutan:          - Penyusunan Rencana          - Penetapan Rencana          - Pengendalian Pelaksanaan Rencana          - Evaluasi Pelaksanaan Rencana          - Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan          Faktor pendukung perencanaan pembangunan:          - Partisipasi masyarakat          - Komitmen pemerintah          Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan secara internal:          - Keterbatasan lahan          - Keterbatasan alokasi dana.          Faktor eksternal:          - Program yang diusulkan keinginan bukan kebutuhan.</p>	<p>1. Berdasarkan hasil wawancara, program pembangunan pemerintah sangat tidak efektif yang ada di Kecamatan Sangatta Utara antara pemerintah dan masyarakat yang masih memiliki perbedaan.          2. Seiring pesatnya pembangunan, maka permintaan dan kebutuhan pun meningkat. Penulis menyarankan pembangunan fisik, dan penataan ruang publik dan pemanfaatan lahan Kabupaten/Kecamatan tidak semata fungsi ekonomis saja, melainkan berfungsi sebagai fungsi sosial dan fungsi kultural harus dapat perhatian juga.</p>

Tabel 1.4

## 2.9 List of Previous International Research Journals

<i>Nu</i>	<i>Title</i>	<i>Issues</i>	<i>Research Methods</i>	<i>Research Results</i>	<i>Advice</i>
1	<i>Growth Models, Developmet Planning, and Implementa tion in the Philippines. (Gonzalo M. Jurado. Philippine Journal of Develop ment. 2003)</i>	<i>The paper will address the issue of whether intervention as necessitated by development plans has strengthened or weakened market forces.</i>	<i>Describe relevant economic growth models, focusing on the variables of interest to them, the goals, the instruments, and how the variables change or move over time until they reach that stage of development.</i>	<i>Philippine development planning has indeed benefited from the wisdom of economic growth models. This has resulted in the enhancement of their quality, technically and statistically. Implementation, to the extent that it can be inferred from the details of plan strategies and instruments, can be said to also have improved. But this conclusion must be tempered by a reference to reality, where over the years plan targets have not been realized or have been realized only partly.</i>	<i>To be more successful in plan implementation, the government at both staff and line levels must articulate the plan more carefully and carry out infrastructural and other supportive programs with greater determination. These efforts will most help invigorate the market.</i>
2	<i>Models of Personal Development Planning: practice and processes. (Sue Clegg and Sally Bradley Sheffield Hallam. University, UK. British Educational Research Journal, 2006.)</i>	<i>This article presents an analysis of case study data from a project evaluating Personal Development Planning (PDP) at a large post-1992 university in England. The study was undertaken as part of a strategy of encouraging schools to build on existing experience while at the same time ensuring consistency with new national guidelines for the implementation of PDP across the whole sector.</i>	<i>Established as a dominant mode of professional practice. The employment model provides a generic skills set, focusing on employability at both graduation and work placement.</i>	<i>The research identified where the focus of PDP support was within the schools and subject disciplines, and was often based on experience from earlier initiatives. Student-focused support is embedded within all the models, and provides for the needs of individual student groups. From our data there is evidence of established practice, however, this is not always recognised as relating to the PDP, especially where current practice coincides.</i>	<i>The models we have suggested are not static, but represent a snapshot of progress at a particular point in time. They have utility in so far as they point to the ways in which staff are conceptualising practice, and to the extent that by holding them up for debate they help the process of reflecting on and possibly reconceptualising practice in the future. In particular, we would welcome work that might extend our suggestion that whether the predominant</i>

					<i>orientation is projectional or introjected.</i>
3	<i>Comprehensive Planning for Sustainable Rural Development. (The Journal of regional analysis policy. Gerrit Jan. University of Maryland – USA, 2007)</i>	<i>Rural land and development policies in most states, however, are often more symbolic than influential, poorly integrated, and grossly misguided.</i>	<i>Such systems now enable rural communities to display land use at the county level, understand critical hydrological and geological systems, analyze trends in population and trade flows, and identify opportunities for new infrastructure, tourist-related development, or environmental investments.</i>	<i>While each of these various programs has its technical merits, the objectives of each are also based on significant fallacies regarding conservation versus preservation, the threat of urban growth, and the most effective approaches to economic development.</i>	<i>The process starts with the recognition that rural comprehensive planning need not simply imply containing urban growth, preserving unprofitable farming activity, or economic development in isolated small towns.</i>



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut berlangsung terutama dalam pembangunan daerah di tahun 2015.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Sei Putih Tengah. Yang beralamat di Jalan. Periuk No. 53 Kota Medan. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana pelaksanaan infrastruktur dari perencanaan pembangunan daerah tersebut yang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Dan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2017

Aktifitas	Bulan															
	Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal	■															
Seminar						■										
Perbaikan Proposal							■									
Pengumpulan Data										■						
Analisis Data														■		
Penulisan Tesis															■	

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kelurahan Putih Tengah di Kecamatan Medan Petisah yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa perwakilan masyarakat.

#### 3.3.2 Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti berpedoman kepada pendapat Sugiyono (2010:Patton 1990), yang mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada kriteria berapa banyak jumlah yang harus di wawancarai. Peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data menjadi jenuh, artinya sampai peneliti tidak menemukan aspek baru dalam fenomena yang diteliti. Patton

1990 memberikan penjelasan yg sangat lugas. Tidak ada aturan mengenai jumlah responden atau *informan* dalam penelitian kualitatif. Maka jumlah sampel sebanyak 11 orang.

Tabel 1.5

Jumlah sampel di Kelurahan Sei Putih Tengah

NO.	Sampel	Nama Sampel	Jumlah Sampel
1	Informan Kunci	Lurah Sei Putih Tengah	1
2	Informan Utama	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah	1
3	Informan Tambahan	Masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah	9
Jumlah			11

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:



1. Informan kunci, yaitu Lurah Sei Putih Tengah.
2. Informan utama, Kasi Pembangunan yang berada di Kelurahan Sei Putih Tengah.
3. Informan tambahan, Masyarakat sebanyak 9 orang. Diantaranya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kepala lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Fasilitator dan beberapa Kepala Keluarga sebagai masyarakat.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Lurah, pegawai Kelurahan, dan warga setempat yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan untuk mengetahui kinerja berlangsungnya hasil dari pelaksanaan partisipatif dalam pembangunan daerah.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian(Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kantor Kelurahan yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada Kelurahan Sei Putih Tengah. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis.

Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan.

Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang adapada Kelurahan Sei Putih Tengah, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58).

Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

### 3.6.1 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

### 3.6.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

### 3.6.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

## 3.7 Rencana Pengujian Keabsahan Data

### 3.7.1. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, analisis membandingkan dengan hasil penelitian, yaitu:

#### 3.7.1.1. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan

ciri-ciri dan unsur unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memuaskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

**3.6.1.2. Dependability** yaitu apakah hasil penelitian mengacu padatingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan (Kriyantono, 2006:58).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahman dkk. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan* Malang, Averroes Press, 2009.
- Alexander, Abe. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Edmund M, Burke. *Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota* : Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2004.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis* : PPM, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, Zulkarnaen. *Solidaritas Sosial Masyarakat Transisi*, Padang : UNP Press, 2012.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Setiady, Elly. *Ilmu Sosial Budaya & Dasar*, Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup, 2007.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara : Jakarta, 1982.

Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta : UNY, 2010.

Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada MediaGroup, 2005.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.

Terry, George.R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara : Jakarta, 2003.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang *Sistem PerencanaanPembangunan Nasional*.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang *Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri No. 0295/M.PPN/1/2005.050/166/SJ

Non Buku:

Bahan Pelatihan : ***Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil.***

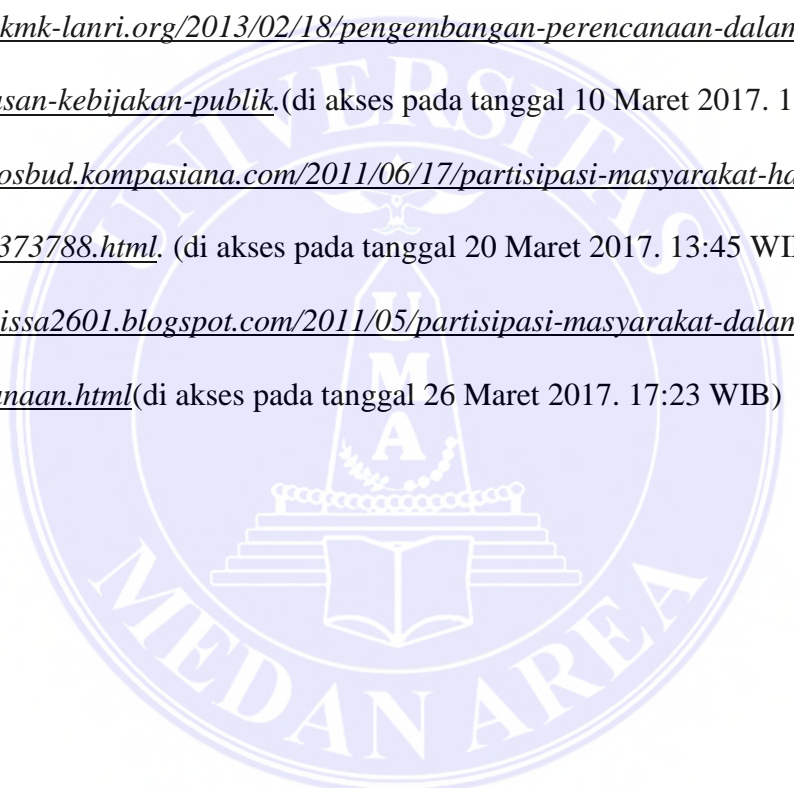
<http://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/-perencanaan-pembangunan-daerah>.(di akses pada tanggal 09 Maret 2017. 15:45 WIB)

<http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-aspek>.  
(di akses pada tanggal 03 Maret 2017. 20:50 WIB)

<http://pkmk-lanri.org/2013/02/18/pengembangan-perencanaan-dalam-perumusan-kebijakan-publik>.(di akses pada tanggal 10 Maret 2017. 11:55 WIB)

<http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/17/partisipasi-masyarakat-hanyalah-mimpi-373788.html>. (di akses pada tanggal 20 Maret 2017. 13:45 WIB)

<http://nissa2601.blogspot.com/2011/05/partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan.html>(di akses pada tanggal 26 Maret 2017. 17:23 WIB)



## Lampiran 1

### Rekapitulasi Realisasi Program Usulan Kelurahan Sei Putih Tengah Tahun 2015

No.	Lingkungan	Program Kegiatan	Jumlah/vol	Realisasi usulan
1	I	Pergantian Tiang Lampu Penerangan Jalan	8 Unit	5 Unit
2	I	Normalisasi Parit	200 Meter	100 Meter
3	II	Pengecoran Jalan	50 Meter	15 Meter
4	VII	Penambahan Bak Sampah Di Pinggir Sungai	2 Unit	1 Unit
5	VII	Pemasangan Tiang Dan Lampu	8 Unit	4 Unit
6	VII	Penanaman Pohon Dengan Pot Bunga	20 Batang	10 Batang
7	VII	Bantuan Mesin Babat	2 Unit	1 Unit



Lampiran 5

**DATA INFORMAN**

**1. Lurah**

Nama : James RE Simanjuntak  
Alamat : Jln. Setia Budi, Medan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 31 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Lurah di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

**2. Kepala Seksi Pembangunan**

Nama : Mahdar Lubis  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jln. Kualu, Medan  
Usia : 51 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Kasi Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

**3. Warga Kelurahan Sei Putih Tengah**

Nama : Drs. Budiman  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jln. Periuk, Medan  
Usia : 52 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Jabatan : Kepala Keluarga

## Lampiran 2

### **HASIL WAWANCARA DENGAN LURAHKELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN**

- 1. Siapa saja pihak-pihak yang ikut serta atau terlibat dalam partisipasi Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Tahun 2015 untuk anggaran di Tahun 2016?**

**Bapak James RE Simanjuntak:** Didalam data sudah ada ya absensi kehadiran, banyak yang hadir, berbagai macam ada dari lingkungan III, IV ada Kepala Lingkungan juga, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri, tapi tidak semua juga, hanya perwakilannya saja.

- 2. Siapa pihak-pihak yang diundang dalam Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah Tahun 2015 untuk anggaran Tahun 2016?**

**Bapak James RE Simanjuntak :** Pihak-pihak yang kita undang itu tentu saja yang tertera ataupun yang ada didalam struktur organisasi dari Kelurahan Sei Putih Tengah, Tokoh Masyarakat juga, Bapak Camatnya.

- 3. Apakah dari semua pihak banyak usulan dalam bidang Infrastruktur?**

**Bapak James RE Simanjuntak :** Banyak. Banyak sekali ya, terutama memang di bidang Infrastruktur yang paling banyak, karena itu pada umumnya, memang kebutuhan dari masyarakat.

- 4. Lebih spesifiknya ke pembangunan Infrastruktur yang seperti apa?**

**Bapak James RE Simanjuntak :** Jalan terutama, lampu, perbaikan jalan, pemasangan lampu.

**5. Sudah di usulkan pak? Terus apakah sudah di jalankan semuanya?**

**Bapak James RE Simanjuntak :** Sudah kita usulkan. Ke Kecamatan juga sudah di usulkan, tapi kita sifatnya hanya menunggu. Mana yang duluan di jalankan sama Pemerintah.

**6. Kenapa bisa seperti itu pak? Dari pihak Kelurahan kah atau memang dari Pemerintah nya yang ada hambatan?**

**Bapak James RE Simanjuntak :** Dari Kelurahan sudah menjalankan sesuai tupoksinya, tapi kita kan hanya menunggu dari Pemerintah mana yang di jalankan terlebih dahulu, bisa jadi karena anggaran mungkin atau karena banyak yang mengusulkan dari semua Kelurahan atau pun Kecamatan, jadi ya sabar sabar lah menunggu, karena sangat banyak sekali.

**7. Selain dari pada itu, apa-apa saja pak kendalanya?**

**Bapak James RE Simanjuntak :** Banyak. Anggaran, bisa jadi juga karena dari masyarakat yang mengusulkan, mana program yang lebih mudah itu yang bisa jadi di dulukan.

*\*Sumber: Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 pada pukul 11:15 WIB*

**HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKSI  
PEMBANGUNANKELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN  
MEDAN PETISAH KOTA MEDAN**

**1. Bagaimana pendapat Bapak sebagai Tokoh Masyarakat dalam melihat partisipasi di Kelurahan kita ini pak?**

**Bapak Mahdar Lubis :** Dari Kelurahan sebenarnya sudah lumayan memberikan informasi yang cukup baik, hanya saja kadang masyarakatnya yang bisa dibilang males-malesan untuk terlibat.

**2. Apa saja tugas dari seorang Tokoh Masyarakat itu sendiri pak?**

**Bapak Mahdar Lubis :** Saya sebagai Tokoh Masyarakat adalah sebagai contoh teladan di Kelurahan kita ini, maka dari itu saya juga harus menunjukkan sikap yang baik dan aktif dalam kegiatan, apalagi kegiatan sosial maupun pembangunan seperti ini, ya di Musrenbang inilah tempatnya.

**3. Setahu Bapak bagaimana pelaksanaan dari perencanaan pembangunan di Kelurahan kita ini pak?**

**Bapak Mahdar Lubis :** Dari perencanaan sudah baik hanya pelaksanaannya saja yang belum optimal.

**4. Apa yang Bapak harapkan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut pak?**

**Bapak Mahdar Lubis:** Yang saya harapkan banyak. Semua bisa terlaksana dengan baik. Lihatlah jalan dan lampu di daerah sini banyak yang benar-benar harus di perbaiki, bahkan masyarakat kadang juga sudah banyak yang mengeluh, malah saya pernah membaca saya lihat di koran, usulan dari masyarakat terhadap jalan di daerah sini.

**5. Kenapa tidak dari Kelurahan saja pak yang duluan mengerjakan?**

**Bapak Mahdar Lubis :** Tidak cukup dana kita dek. Dari Kelurahan tidak bisa sebanyak itu mengerjakan mana duluan, menunggu dari Pemerintah.

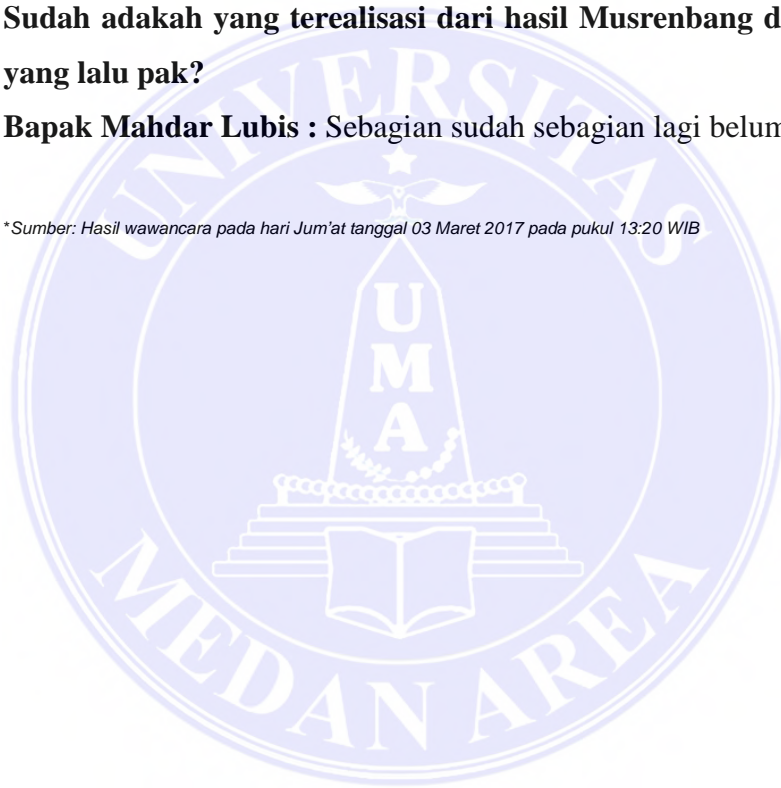
**6. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada masyarakat akan hal itu pak?**

**Bapak Mahdar Lubis :** Masyarakat kadang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa menyalahkan kita dari pihak Kelurahan. Maka dari itu di Musrenbang nya kita selalu menjelaskan kenapa dan kenapa terkendala.

**7. Sudah adakah yang terealisasi dari hasil Musrenbang di Tahun 2015 yang lalu pak?**

**Bapak Mahdar Lubis :** Sebagian sudah sebagian lagi belum.

*\* Sumber: Hasil wawancara pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 pada pukul 13:20 WIB*



Lampiran 4

**HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA KELURAHAN SEI PUTIH  
TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN**

**1. Pak bagaimana pembangunan di Kelurahan kita ini pak?**

**Bapak Budiman :** Banyak yang harus di perbaiki dek.

**2. Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan pembangunan di Kelurahan ini pak?**

**Bapak Budiman :** Gak jelas dek. Masih seperti yang dulu.

**3. Kenapa bisa seperti itu pak?**

**Bapak Budiman :** Ada musyawarah pun, masih tidak terpenuhi yang kita inginkan sebagai masyarakat.

**4. Pembangunan yang seperti apa yang Bapak inginkan?**

**Bapak Budiman:** Pembangunan jalan, aspal, lampu. Itu kan penting dek. Banyak dampak buruknya jika tidak benar-benar di penuhi. Pembangunan itu perlu karena berdampak ke kesejahteraan masyarakat.

**5. Menurut Bapak bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut dan apakah Kelurahan tersebut sudah mencerminkan proses partisipatif?**

**Bapak Budiman :** Masih ada yang gak mau tahu. Penyusunan sudah dikatakan partisipatif karena mengikutsertakan dari sebagian masyarakat walaupun gak aktif.

6. Menurut Bapak apa kira-kira yang menjadi kendala-kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Tahun 2015 untuk anggaran Tahun 2016? dan apa upaya yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

**Bapak Budiman :** Kendala di masyarakat lah, gak banyak yang mau tahu. Kalo upaya sampai saat ini belum ada, karena kami masih menginformasikan secara langsung ya, baru itu. Selebihnya ya kesadaran masyarakatlah. Karena hanya iming-iming musyawarah saja tapi tidak terlaksana kami juga jadi malas dek jika di suruh berpartisipasi aktif.

7. Realisasi penyusunan 2015 sampai dengan saat ini, menurut Bapak, bagaimana kualitas pelayanan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan saat ini?

**Bapak Budiman :** Ini masih ditingkatkan agar lebih berkualitas lagi dengan cara memperhatikan setiap pembangunan di Kelurahan kita ini. Semua proses berjalan dengan baik namun pelaksanaannya yang sering kali tidak berjalan karena kendala pendanaan yang pada hakekatnya adalah kewenangan pemerintah kota untuk mengucurkan dana.

*\*Sumber: Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 pada pukul 14:15 WIB*